



JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>

Intervensi Partai Politik dalam Sukses Kepemimpinan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 33 di Jombang tahun 2015

Political Party Intervention in the 33rd Nahdlatul Ulama Congress (Muktamar NU) Leadership Succession in Jombang 2015

Abdul Hakim Syafi'i*, Budhi Gunawan & Firman Manan

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Indonesia.

Diterima: 28 Juni 2019; Disetujui: 14 Agustus 2019; Dipublish: 01 Desember 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya intervensi dari partai politik terhadap Muktamar Nahdlatul Ulama ke 33 di Jombang. Dalam penelitian ini, berhasil mengungkap fakta bahwa konflik politik yang terjadi dalam muktamar Jombang tidak muncul serta-merta, melainkan akumulasi dari berbagai relasi *antagonistik* di seputar pengelolaan organisasi kaum *nahdliyyin*. Tentu saja, determinan utamanya tak lepas dari proses rivalitas politik antar elit NU dalam rangka menguasai dan mempengaruhi kebijakan organisasi NU untuk kepentingan masing-masing. Dalam konteks itulah, analisis menggunakan teori konflik dan elit digunakan sebagai pisau analisis sehingga menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik politik terhadap suksesi kepemimpinan dalam muktamar Nahdlatul Ulama ke 33 di Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Melalui penelitian ini bermaksud memberikan sumbangan sebuah karya yang dapat menjadi bahan refleksi bagi organisasi Nahdlatul Ulama. Sebagai sebuah kerja akademis penelitian ini berusaha semaksimal mungkin mengedepankan obyektivitas. Melihat dinamika yang terjadi pada muktamar NU yang ke 33 di Jombang tahun 2015, maka Peneliti tertarik ingin melihat mengapa elit partai politik terlibat langsung terhadap penyelenggaraan muktamar NU sehingga terlihat adanya intervensi partai politik terhadap hasil Muktamar dan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik politik dalam Muktamar tersebut.

Kata Kunci: Intervensi Partai Politik, Nahdlatul Ulama, Konflik Elite Politik

Abstract

This research aims to find out that there is political party intervention in the 33rd Nahdlatul Ulama Congress (Muktamar NU) in Jombang. This research managed to uncover the fact that political conflict unfolding during the Muktamar has not emerged suddenly, but the accumulation from the diverse antagonistic relation among nahdliyyin's organizational management. Of course, the main determinant was inextricably linked with political rivalries among NU elite in order to dominate and to influence the NU's organizational policy according to each interest. In light of the context, therefore, conflict and elite theory analysis are used as analytical lancet so as to find the driving factors in the conflict within the 33rd NU Muktamar leadership succession. This research uses the qualitative method with descriptive research type. Data were collected through observation and interview. Through this research, I intend to give the scientific contribution that can be considered as a reflection matter for NU organization. As a scientific work, this research tries as much as possible to prioritize the objectivity. Through the unfolding dynamic in Muktamar NU in Jombang, I am interested in to scrutinize why political party elite involve directly there so it appears that there is political parties intervention to the Muktamar result and I want to find out what factors drove political conflict in the Muktamar.

Keywords: Political Party Intervention, Nahdlatul Ulama, Political Elite Conflict.

How to Cite: Syafi'i, A.H. Gunawan, B. & Manan, F. (2019). Intervensi Partai Politik dalam Sukses Kepemimpinan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 33 di Jombang tahun 2015. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (2): 213-227.

*Corresponding author:

E-mail: hakimnusantara5@gmail.com

PENDAHULUAN

Nahdhatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang didirikan pada 16 Rajab 1344/ 31 Januari 1926 di Surabaya oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah. Bentuk keorganisasian Nahdlatul Ulama (NU) berubah-ubah secara dinamis mengikuti perkembangan pada masanya. Berawal dari organisasi sosial keagamaan lalu berubah menjadi organisasi politik, lalu kembali lagi menjadi organisasi sosial keagamaan, kemudian berubah lagi menjadi organisasi sosial keagamaan yang mendirikan partai politik.

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Nahdlatul Ulama (NU), Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi NU. Muktamar diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), setiap 5 (lima) tahun sekali. Sebagai kekuasaan tertinggi keberadaannya sangatlah strategis dan menentukan perjalanan organisasi ini. Melalui forum itulah dirumuskan berbagai keputusan dan kebijakan strategis, serta ditentukan kepemimpinan organisasi di level PBNU. Oleh karena itu, sering kali muktamar tidak hanya dijadikan arena merumuskan program keumatan, melainkan juga perebutan kepemimpinan,

baik *Rais Aam Syuriah* (Dewan Penasehat) maupun Ketua Umum *Tanfidziyah* (Dewan Pelaksana). Berdasarkan fakta sejarah bagaimana terjadi pergulatan politik antar elit NU terjadi pada setiap muktamar.

Dalam Muktamar ke 33 yang diselenggarakan di Jombang Jawa Timur itu, KH. Said Aqil Siradj terpilih menjadi ketua umum PBNU (Tanfidziah) periode 2015-2020 dan KH. Mustofa Bisri di daulat menjadi Rais Aam PBNU, akan tetapi beliau mengundurkan diri dan digantikan oleh KH. Ma'ruf Amin. Terpilihnya KH. Said Aqil Siradj kembali memimpin NU memantik reaksi. Seorang kandidat calon ketua umum tidak menerima proses dan hasil muktamar itu, bahkan meminta diulang. (Liputan6.com, 8 Oktober 2017 19:05 WIB). KH. Solahuddin Wahid yang juga sebagai kandidat calon Ketua Umum (Tanfidziah), mengadukan perkembangan konflik di dalam tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada Mutasyar PBNU yakni KH. Muhammad Tholchah Hasan dan pihaknya bersama Forum Lintas Pengurus Wilayah NU menggugat PBNU ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menilai Muktamar yang kembali menetapkan KH. Said Aqil Siradj Sebagai Ketua Umum itu cacat hukum sehingga kaum Nahdliyin resah. Keresahan inilah katanya disampaikan kepada KH. Tolchah Hasan. Kemudian KH.

Solahuddin Wahid menyerahkan buku putih tentang Mukdammar Hitam yang disusun oleh Forum Lintas Ulama NU. (Bangsa Online.com. Minggu, 8 oktober 2017 22:00 WIB) Sementara dalam pernyataannya KH. Said Aqil Siradj sendiri mempersilahkan bila ada pihak- pihak yang ingin menggugat hasil Mukdammar NU ke pengadilan. (Tempo.co, Minggu 8 oktober 2017 22:01 WIB).

Sebagai sebuah organisasi besar, NU sering kali digoncang oleh konflik internal. Sumber konflik sangat beragam, dari masalah kepentingan pribadi hingga kepentingan kelompok. Keragaman pendapat dan sikap ditubuh NU bukan saja berimplikasi pada perbedaan dan pertentangan antar individu, melainkan juga terjadinya pengelompokan-pengelompokan. Konflik Mukdammar NU bukan kali ini saja terjadi, hampir setiap perhelatan Mukdammar diwarnai berbagai macam konflik, salah satunya konflik yang cukup keras yakni pada Mukdammar ke 27 di Situbondo tahun 1984. Dimana melahirkan dua kubu yang bersebrangan yang sama kuat dan sama- sama mempersiapkan strategi, teknik, taktik mengalahkan lawan di arena Mukdammar. Ada Kubu ulama dipimpin oleh KH. As'ad Syamsul Arifin, dikenal juga sebagai kubu Situbondo, dan kubu sayap politik pendukung KH. Idham Chalid (Ketua

Umum PBNU), yang dikenal dengan kubu Cipete, Nama Cipete diambil dari daerah kediaman Idham Chalid di Kompleks Pondok Pesantren Darul Ma'arif, Jakarta Selatan (Arif Mudatsir Mandan, 2010:18-19).

Dalam Mukdammar NU yang digelar pada tahun 2015 di jombang, salah salah satu penyebab terjadinya konflik adalah adanya indikasi elit partai politik ikut bermain dalam mukdammar sehingga banyak bantahan dari panitia penyelenggara atau pun para kandidat yang mencalonkan diri sebagai ketua Tanfidziyah periode 2015- 2020, bahwa tidak ada intervensi partai politik, baik secara pendanaan penyelenggara acara maupun pencalonan para kandidat tidak ada yang di biayai oleh salah satu partai politik tertentu.

Penyelenggaraan Mukdammar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, menghasilkan terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai *Rais Aam Syuriah* dan Said Aqil Siradj kembali menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Namun terpilihnya dua pucuk pimpinan NU itu menyisakan persoalan. Gejolak yang terjadi di ajang mukdammar yang memantik kegaduhan di antara para peserta. Campur tangan elite politik kian terasa ketika hampir semua elite politik datang ke Jombang, adanya bantuan

finansial dari beberapa menteri yang juga merupakan salah satu kader partai politik yang hadir dalam muktamar NU. terlihat bagaimana kepentingan elit Partai Politik yang terlibat dalam suksesi kepemimpinan dengan cara, yaitu keterlibatan pengurus partai yang juga pengurus NU dalam kepanitian muktamar, dengan cara mengkonsolidasikan para PWNU dan PCNU untuk mengawal pengurus NU di daerah masing-masing dalam rangka mengawal suara di muktamar, dan bantuan finansial dalam bentuk kegiatan yang diadakan para elite partai politik yang hadir dalam kegiatan rangkaian acara Muktamar.

Dalam konteks inilah elit NU dan kelompok elit politik memainkan peran aktif dalam perebutan kekuasaan melalui suksesi kepemimpinan di NU. Seperti yang dijelaskan oleh Pareto, bahwa elit terbagi dua yakni, elit yang berkuasa dan elit tandingan. Elit Partai Politik yang merupakan bagian dari elit NU juga dan saat ini merupakan pihak dari kelompok elit yang berkuasa. Said Agil Sirodj dianggap bagian dari kelompok elite partai karena secara historis ia adalah salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Selain itu kemenangan di Muktamar Makasar tidak lepas dari dukungan salah satu partai politik terhadap dirinya. Sehingga nampak bahwa kepentingan elit partai Politik

tertentu dalam suksesi kepemimpinan NU adalah untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam konsep pergantian elit menurut Pareto, bahwa pihak pemegang kekuasaan akan selalu meningkatkan unsur-unsur kualitas superiornya pada kelompok yang lain.

Melihat dinamika yang terjadi pada muktamar NU yang ke 33 di Jombang tahun 2015, maka peneliti tertarik ingin melihat mengapa elit partai politik terlibat langsung terhadap penyelenggaraan muktamar NU sehingga terlihat adanya intervensi partai politik terhadap hasil Muktamar dan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik politik dalam Muktamar tersebut.

Berpijak pada keseluruhan paparan di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul: Intervensi Partai Politik dalam Suksesi Kepemimpinan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 33 di Jombang tahun 2015. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yaitu untuk menjelaskan bagaimana peran partai politik dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi partai politik dalam mengintervensi hasil Muktamar ke 33 di Jombang, Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus. Studi kasus berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok, ataupun suatu potret kehidupan. Selama tiga dekade, studi kasus telah didefinisikan oleh lebih dari 25 ahli. Creswell mengatakan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalam penerapannya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

Untuk memperoleh data yang bersumber dari penuturan informan, peneliti akan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para narasumber. Model wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*), dimana pertanyaan-pertanyaan tidak diatur dalam suatu urutan ataupun aturan yang khusus. Menurut Maynard, sebuah penelitian elit memerlukan penggunaan pertanyaan-pertanyaan non baku (*non-standart questions*). Tentunya dalam melakukan wawancara pertanyaan-pertanyaan bisa dikembangkan dan tetap dalam rangka penelitian. Agar jawaban-jawaban responder tetap dalam konteks fokus penelitian maka sebelum wawancara

akan dibuat panduan atau pedoman terlampir. Disamping itu juga, dilakukan diskusi terbatas dengan beberapa ahli dan narasumber yang kebetulan berhubungan langsung dengan penelitian tersebut (Stratus).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewancarai secara mendalam (*indepth interview*) dengan para Kiai (elit NU) yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam dinamika suksesi kepemimpinan pada Muktamar NU ke 33 di Jombang. Tentu saja peneliti akan melihat Kiai NU yang ada di struktural, baik yang ada di PBNU maupun PWNU, dan di luar struktural. Sebab banyak kiai yang tidak menjadi pengurus NU baik di pusat maupun di daerah tetapi mempunyai pengaruh yang sangat besar pada warga NU, bahkan mereka menjadi panutan dan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus NU baik di pusat maupun di daerah.

Pengumpulan data yang digunakan melalui berbagai sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain

(Lofland dan Lofland). Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada awal proses penelitian serta pada akhir penelitian (Nasution). Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan kabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Konflik dan Kepentingan Politik dalam Muktamar Jombang

Muktamar NU yang digelar di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015 menjadi ajang persaingan yang sengit memperbutkan kepemimpinan NU yang baru. Di level tanfidziyah, suasana persaingan untuk memperebutkan posisi Ketua Umum PBNU sudah terasa jauh sebelum Muktamar digelar. Bursa kandidat sudah mulai diperbincangkan setahun sebelum Muktamar, bahkan para kandidat sudah membentuk tim sukses untuk menyiapkan pemenangnya. Sekitar setengah tahun sebelum Muktamar mereka sudah mulai melakukan konsolidasi ke daerah-daerah untuk menggalang dukungan PWNU dan PCNU.

Semakin mendekati pelaksanaan Muktamar, suasana semakin menghangat.

Setidaknya ada lima kandidat calon ketua PBNU untuk periode 2015-2020 yang diprediksi memiliki kans maju dan siap memimpin tanfidziyah PBNU. Mereka adalah KH Said Aqil Siroj, KH Salahuddin Wahid, KH As'ad Said Ali, KH. Adnan, dan KH. Idrus Ramli.

Pertama, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A atau sering dikenal Said Aqil Siroj lahir di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, 3 Juli 1953 saat ini masih menjabat Ketua Umum (Tanfidziyah) Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama periode 2010–2015. Said Aqil diakui memiliki pengalaman di dunia Islam. Dia menjalani pendidikan S1 di Universitas King Abdul Aziz, Jurusan Ushuluddin dan Dakwah, tamat 1982, dan gelar doktornya diperoleh di Universitas Ummu al-Qura, jurusan Aqidah/Filsafat Islam, tamat 1994. Pernah menjabat anggota MPR RI, Said Aqil mengajar di sejumlah perguruan tinggi dan pesantren di Indonesia. Rais syuriah PBNU (1999-2004), Dosen pasca sarjana Unisma Malang (2003-sekarang), Anggota Komnas HAM (1998-1999), dan sejumlah pengalaman penting.

Said Aqil Siradj merupakan kandidat petahanan Ketua Umum PBNU dan menyatakan siap menang dan kalah dalam muktamar. “Saya pasrah pada ketetapan

Allah SWT, siap menang dan siap kalah.” Kiai Said menegaskan keputusannya maju kembali dalam perebutan kursi ketum PBNU tanpa didasari pada kepentingan mempertahankan jabatan. “saya mengalir aja, dipercaya kembali memimpin saya siap, tidak juga tidak apa-apa, di NU itu mengabdikan. Saya pasrah ketentuan Allah, diberi kepercayaan lagi saya siap, tidak juga tidak apa-apa,” tambahnya sembari membantah kabar pengunduran dirinya dari bursa Ketum PBNU.

Kedua, KH. Salahuddin Wahid yang akrab disapa Gus Sholah ini merupakan salah satu tokoh masyarakat yang telah lama dikenal sebagai sosok yang idealis dan memiliki komitmen tinggi untuk memajukan Indonesia ke depan. Putra ketiga dari 6 bersaudara pasangan KH. Wahid Hasyim (Ayah) dengan Sholichah (Ibu) dan adik kandung dari mantan presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini selain seorang ulama, ia juga merupakan seorang aktifis, politisi, dan tokoh HAM (Hak Asasi Manusia). Sebagai tokoh ulama kelahiran Jombang, 11 September 1942, Gus Sholah pernah menjabat sebagai anggota MPR (Majlis Permusyawaratan Rakyat) pada masa awal reformasi pada tahun 1998 dibawah pimpinan Suharto.

Di tahun 2004, Gus Sholah pernah mencalonkan diri sebagai kandidat wakil

presiden pada panitia pemilu saat itu. Namun langkahnya terhenti pada babak pertama, karena menempati urutan ketiga. Dan untuk saat ini, tokoh yang disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Mukhtamar ke-33 di Jombang. Gus Sholah dipercaya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang untuk menggantikan posisi Kyai Yusuf Hasyim (paman). Peletakan jabatan ini dilakukan Kyai Yusuf Mansur dengan sukarela tanpa ada desakan dari pihak manapun sebelum ia meninggal dunia (Imron).

Ketiga, Waketum PBNU KH Asad Said Ali akan menjadi penantang Ketum Said Aqil dan Gus Solah dalam Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Nama Asad tak asing lagi sebagai tokoh nasional yang sempat pula disebut-sebut akan menjabat sebagai Kepala BIN. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, As'ad mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada pada jurusan Hubungan Internasional, FISIPOL. Secara kebetulan Asad lahir bertepatan dengan hari lahir kampus yang terletak di Bulaksumur, Yogyakarta tersebut pada 19 Desember 1949. Sebelum berkuliah, Asad merupakan santri dari pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.

Setelah lulus dari UGM, Asad diminta oleh tokoh NU Subhan ZE untuk berkiprah di Badan Koordinasi Intelejen Negara (BAKIN). Berbekal ilmu hubungan internasional dan pesantren, Asad kemudian ditugaskan di negara-negara timur tengah. Pada tahun 1999 di era Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid, Asad kemudian didaulat untuk menjadi Wakil Kepala BIN. Sejak saat itu sampai dengan 9 tahun kemudian Asad bertahan sebagai WakaBIN.

Kempat, KH Muhammad Adnan lahir di Semarang pada 16 September 1960. Beliau adalah mantan Ketua PWNU Jawa Tengah yang kini menjabat sebagai Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah. KH Muhammad Adnan bisa dibilang merupakan figur yang kurang terdengar bila dibandingkan dengan calon ketua umum yang lain. Tetapi kesederhanaannya dan pengalamannya dalam organisasi NU sebagai Ketua PWNU Jawa Tengah ini membuatnya didukung oleh sejumlah sesepuh NU seperti KH Dzikron Abdillah dan KH Achmad. Tidak hanya itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mendukung Adnan untuk menjadi Ketua Umum PBNU mendatang.

Pria kelahiran 1960 ini merupakan seorang akademisi di bidang ilmu politik dari kalangan santri. Latar belakang pendidikannya diawali dengan menjadi

santri di Pesantren Darun Nasidin, Malang, Jawa Timur. Gelar master perbandingan politik diperolehnya dari Hiroshima University, Jepang. Saat ini dirinya tercatat sebagai staf pengajar di FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah dan tengah menempuh program doktoral ilmu politik di universitas tersebut.

Kelima, Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang memunculkan satu nama lagi kandidat calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sosok tersebut adalah Muhammad Idrus Ramli alias Gus Idrus, seorang pemikir muda NU yang menjadi anggota Dewan Pakar Ahlusunnah wal Jamaah Center atau Aswaja Center Jawa Timur.

Deklarasi Idrus Ramli dilakukan di Media Center Muktamar ke-33 NU di kawasan alun-alun Kabupaten Jombang saat muktamar berlangsung, yakni pada hari Senin, 3 Agustus 2015. Idrus menyampaikan, niatnya untuk mencalonkan diri dimotivasi oleh keprihatinan dia melihat degradasi akidah generasi muda Islam Indonesia, terutama dari kalangan warga NU atau disebut nahdliyin. "Kaum muda NU banyak mengalami degradasi akidah. Banyak warga muda NU yang meloncat ke Islam garis keras. Sementara orang-orang di struktural (pengurus NU), sibuk dengan agenda lain-lain," ujar Idrus.

Intervensi Partai Politik di Arena Muktamar

Tudingan adanya intervensi politik dari Partai Politik terhadap Muktamar NU di Jombang terus bergulir. Mantan Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jatim Achmad Heri menganggap Muktamar NU kali ini hanya melibatkan golongan tertentu, bukan seluruh Nahdhliyin. "Saya melihat adanya golongan yang ingin menyeret-nyeret NU. Mereka secara total ingin melemahkan NU dengan berbagai cara."

Upaya demikian, ujar dia, akan mengerdilkan NU kedepan. Menurutnya, NU itu ibarat gentong yang airnya bisa disalurkan ke dalam gelas-gelas lainnya. Sementara yang terjadi saat ini, ada gelas berupaya menarik gentong tersebut. Kondisi ini yang bisa mengkerdilkan NU. Namun, Heri enggan menyebut dari partai mana. "Sampean (Anda) sudah tahu parpol mana yang ada di Muktamar. Mereka diduga membawa kepentingan Parpol di Muktamar ke-33 dan upaya pemenangan salah satu kandidat," ujarnya.

Sebelumnya, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Jombang mencium agenda terselubung yang dilakukan PKB dalam perhelatan Muktamar. Selain untuk suksesi KH Said Aqil Sirodj sebagai Ketua Umum PBNU, intervensi PKB juga untuk suksesi Saifullah Yusuf dan Halim Iskandar dalam Pilgub Jatim 2018 "Memang Pilgub

Jatim masih lama. Tapi PKB sudah menyiapkan lewat muktamar tahun ini. Kedepan, calon yang diusung PKB akan disuport oleh PBNU. Saya menilai ada arah kesitu," kata Sekretaris PC Gerakan Pemuda Ansor Jombang, Muizun Hakam.

Dia juga menegaskan dalam salah satu situs berita online, bahwa perhelatan akbar ormas terbesar ini digunakan sebagai momentum pencitraan oleh Ketua Panitia Daerah Muktamar Ke 33 NU Saifullah Yusuf dan Ketua PKB Jatim Abdul Halim Iskandar. Maka tidak heran, gambar Halim Iskandar bertebaran di setiap titik di Kota Jombang. Muiz juga menilai, upaya pemenangan KH Said Agil dan KH Mustofa Bisri serta pencitraan yang dilakukan oleh Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Halim Iskandar (Gus Halim), sejak awal terlihat kentara mengarahkan dengan mensetting komposisi Panitia Daerah Muktamar. Yakni, posisi Ketua Panda dipegang sendiri oleh Saifullah Yusuf dan Sekretaris Panitia daerah diisi oleh Thoriqul Haq yang notabene Sekretaris DPW PKB Jatim. Sementara itu pada tingkatan kepanitiaan lokal juga diisi oleh orang-orang dari partai berlambang bola dunia tersebut. Mereka antara lain Subaidi Muhtar (Ketua DPC PKB Jombang), Munir Al Fanani (Sekretaris DPC PKB Jombang) dan Mas'ud Zuremi (anggota DPRD Jombang dari PKB). Sedangkan mereka yang

notabene dari badan otonom NU setempat, nyaris tidak mendapat posisi strategis dalam kepanitiaan.

Selain itu, secara kasat mata intervensi Parpol semakin kentara di Muktamar NU ke 33. Selain bertebarannya bendera dan atribut partai yang seolah sengaja disandingkan dengan bendera NU, para kader dan pengurus PKB juga disusupkan ke arena formal muktamar sebagai peninjau bahkan ada yang memegang kartu tanda peserta (co-card).

Sementara itu, para Ketua Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom NU banyak yang tidak dilibatkan di ruang-ruang sakral persidangan Muktamar. Sekretaris Tanfidz PWNU Papua Barat, Syahrudin Makki mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah delegasi peserta muktamar yang mewakili empat Kabupaten di Provinsi Papua Barat, yakni Kabupaten Pegunungan Apak, Manokwari Selatan, Maybrat dan Telukwondama. Padahal di empat kabupaten tersebut, kata Syahrudin belum dibentuk cabang NU. "Kami tak pernah merekomendasikan Pembentukan Cabang NU di sana. Karena memang tidak ada muslim di sana. Kami tak bisa mengusir mereka karena mereka memiliki co-card peserta."

Empat cabang tersebut, kata Syahrudin datang tanpa koordinasi PWNU Papua Barat dan setelah

diidentifikasi mereka adalah pengurus DPC PKB Kabupaten Manokwari. "Mereka bukan warga Manokwari, sepengetahuan kami mereka pengurus PKB Manokwari. Tapi anehnya mereka mengklaim punya SK dari PBNU padahal tak pernah kami rekomendasikan. Anehnya lagi bisa lolos menjadi peserta tanpa verifikasi. Kenapa panitia melegalkan? Siapa yang menghadirkan mereka di sini? Intervensi parpol sangat kental dalam muktamar ini," ujarnya.

Hal serupa diungkapkan Ketua Tanfidz PWNU Kepulauan Riau, Tarmudzi Tohor. Menurutnya, dalam sejumlah agenda sidang komisi hingga sidang pleno lalu, banyak pengurus PKB menyusup sebagai peserta maupun peninjau. "Muktamar ini terlihat tidak murni lagi dilaksanakan oleh NU karena di mana ada kegiatan, baik sidang komisi, pleno dan sebagainya, kok selalu ada orang-orang partai di situ. Ada apa ini, pasti ada sesuatu di belakangnya?"

Ia juga mengungkapkan, kekisruhan di Muktamar NU ini disebabkan oleh kegagalan panitia dalam memenej forum, pelanggaran AD-ART oleh elit PBNU dan Panitia Muktamar, serta kentalnya intervensi Partai politik. "Ada apa sebenarnya, muktamar kenapa dibikin rebut-ribut begini. Saya berharap semua kembali ke hati nurani, mari bermuktamar

yang benar, bukan bermuktamar karena kepentingan-kepentingan tersendiri. Kericuhan ini bermula dari ketidakjelasan panitia dalam mengacu pada konstitusi. AD-ART banyak dilanggar. Buktinya saat sidang yang membahas hal selaras AD-ART, tidak rebut. Tapi saat membahas hal di luar AD-ART, muktamirin menolak."

Lebih lanjut, Tarmudzi juga menyoroti pelaksanaan Pleno LPJ yang tanpa disertai pandangan umum. "Semua PW seharusnya diberi kesempatan mengomentari, soal diterima atau tidak, terserah forum. Karena itu kita tetap menuntut ada pandangan umum," tukasnya.

Berebut Pengaruh dengan Bendera Partai Politik

Dari pengamatan penulis wawancara dengan masyarakat di Jombang, memang sejak sebelum pelaksanaan Muktamar dimulai, suasana di Jombang sudah mulai menghihau oleh atribut NU. Di jalan-jalan protokol, kota Jombang, dan sepanjang jalan Surabaya-Madiun umbul-umbul dan bendera NU bertebaran. Layaknya sebuah kampanye, bendera partai dan gambar tokoh politik itu seolah berebut pengaruh dari para para muktamirin dan warga NU yang hadir ke Muktamar.

Bendera partai politik dan spanduk bergambar pengurus partai bertebaran di jalan-jalan protokol kota Santri, Jombang.

Meski sejumlah pihak adanya muatan politik dalam pergeleran Muktamar NU ke-33 ini, nampaknya tidak ada penertiban terhadap atribut parpol tersebut. Misalnya, di sepanjang jalur Surabaya-Madiun di wilayah Jombang, bendera Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpasang di sejumlah titik. Di antaranya di Jalan Raya Mojoagung, Peterongan, hingga Keplaksari. Bendera PKB menghiiasi tepi jalan raya dan jembatan. Bahkan di fly over Peterongan, ratusan bendera PKB terpasang di tepi jalan layang berdampingan dengan bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemandangan serupa terlihat di taman Ringin Contong, Kota Jombang. Puluhan bendera PPP yang berwarna hijau muda terpasang diantara bendera NU.

Selain berupa bendera partai, spanduk dan baliho bermuatan politik juga bertebaran di jalan-jalan protokol Kota Jombang. Spanduk dan baliho besar tersebut berisi ucapan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Muktamar NU ke-33. Hanya saja, gambar tokoh politik pengurus partai terpampang jelas beserta simbol partai.

Menjamurnya atribut parpol nampaknya tidak mendapat respon dari panitia muktamar. Padahal sebelumnya, Yayasan Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang getol menolak apabila muktamar dicampuri urusan politik. Mereka

menertibkan atribut partai yang sempat dipasang di lingkungan pesantrennya. Seperti yang dikatakan humas Yayasan Bahrul Ulum dalam koran Duta Masyarakat, "tempat kami murni menjadi tempat bagi tamu Nahdlatul Ulama (NU) bukan tamu partai atau yang lainnya. Semua harus menanggalkan partai masing-masing dan fokus ke NU, tidak boleh terkontaminasi kepentingan yang lain".

Terhadap tudingan tersebut Muhaimain Iskandar (Cak Imin) menyangkal, bahwa partainya tidak punya kepentingan apa pun dalam Mukhtamar NU tersebut. Dia mengklaim PKB hanya mendukung melalui kader-kadernya, baik yang duduk di pemerintahan pusat, pemerintah daerah, maupun yang jadi anggota dewan. "PKB tidak punya kepentingan apa pun. Semua *support* total pelaksanaan Mukhtamar NU ini," kata dia.

Cak Imin menambahkan, pihaknya juga tidak mendukung salah satu calon Ketua PBNU yang akan maju. Karena itu dia tidak bisa memprediksi siapa calon terkuat untuk jadi Ketua PBNU selanjutnya. "Saya tidak tahu. Kita tidak ikut. Posisi PKB, posisi tuan rumah hanya memfasilitasi dengan baik. Soal siapa ketuanya, peserta yang menentukan," ucap dia.

Namun demikian, Pandangan Martin van Bruinessen tentang peran PKB dalam keterlibatannya dalam Mukhtamar NU ke 33 merupakan hal yg sulit untuk dibantah. Partai yg didirikan oleh para sesepuh NU, termasuk Gus Mus sendiri, itu sangat berkepentingan utk tetap dapat memegang hegemoni dalam organisasi tersebut walaupun hal itu dicoba ditepis oleh para elitnya, baik di pusat maupun daerah. Setelah tenggelamnya PKNU, PKB cak Imin kemudian menjadi alternatif warga nahdhiyyin yg paling utama, sementara PPP yg juga memiliki klaim kesejarahan dengan NU harus puas menjadi pilihan berikutnya. Partai-partai politik lain tidak memiliki kaitan historis seperti keduanya kendati bukan berarti kaum nahdhiyyin tidak tertarik untuk menjadi kader dan pendukung mereka. Faktanya beberapa aktivis dan politisi yg berlatarbelakang NU cukup aktif dan menduduki posisi-posisi strategis di Golkar, PDIP, Demokrat, Nasdem, Gerindra, Hanura.

Hanya saja PKB Iminlah yg memiliki pertaruhan paling besar jika NU menjadi ormas yg kian mandiri apalagi "netral" dalam menghadapi semua parpol. Wilayah-wilayah basis NU seperti Jatim, sebagian Jateng, sebagian Jabar, Kalsel, sebagian Sumsel, dan sebagian Maluku, tentu merupakan andalan bagi perolehan suara PKB dlm Pileg maupun Pilkada. Tak

terlalu berlebihan jika seorang tokoh senior seperti Kiai Hasyim Muzadi dan Solahuddin Wahid mengatakan bahwa intervensi PKB pada Muktamar ini sangat kuat. Sebegitu kuat sehingga Gus Solah sempat mempertanyakan apakah Muktamar ini milik NU atau PKB?. Apa yg dikatakan Martin van Bruinessen sejatinya sama dan sebangun dengan sinyalemen kedua tokoh senior NU tersebut.

Sejarah dan perkembangan NU tentu tak akan lepas dari dinamika politik di negeri ini. Baik langsung atau tidak NU dan warganya akan terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga politik merupakan sebuah keniscayaan dalam perkembangan NU dari dulu, sekarang dan yang akan datang. Apalagi sebagai salah satu kekuatan besar dalam masyarakat sipil Indonesia, NU suka atau tidak akan terus diminta dan bahkan suatu ketika dipaksa untuk berkontribusi di dalamnya. Itu sebabnya para elite NU, baik Ulama maupun zu'ama serta kelompok profesionalnya selalu melakukan berbagai inovasi agar kiprah politik tidak mereduksi apa yang menjadi tujuan utama organisasi ini. Di era demokrasi saat ini peran politik NU jelas berbeda dengan sebelumnya karena NU telah berkomitmen untuk kembali ke Khittah.

Implikasinya adalah bahwa permainan kepentingan politik kekuasaan

tidak boleh masuk dan menghegemoni jam'iyah. Sebab jika hal ini terjadi maka NU yg akan dirugikan karena tereduksi menjadi semacam alat dan arena penggelaran kepentingan mereka. Jika benar bahwa Muktamar ke 33 dikendalikan atau dikontrol oleh kekuatan parpol niscaya kemandirian dan martabat organisasi serta para ulama yg menjadi sokogurunya akan tergerus. Alih-alih NU bisa menjalankan peran organisasi dakwah dan pendidikan yang memelihara tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah, ia malah akan menjadi alat politik elite dan kepentingan yg sempit dan berjangka pendek.

SIMPULAN

Seperti dalam setiap perhelatan mukta-mar, isu suksesi kepemimpinan di tubuh NU menjadi pembahasan utama dan sekaligus sumber dinamika konflik antar elit NU dan pihak luar yang punya kepentingan terhadap NU. Muktamar yang harusnya menjadi ajang konsolidasi organisasi dan momentum pengutan gerakan sebagai elemen *civil society*, kerap menunjukkan kondisi dan fenomena yang lebih menonjolkan konflik perebutan kekuasaan antar faksi di tubuh NU. Hasil dari penelitian ingin memberikan gambaran utuh apa saja faktor penyebab terjadinya konflik elit NU dan menjelaskan pergulatan kepentingan politik dalam

suksesi kepemimpinan pada Muktamar di Jombang.

Dalam penelitian ini, berhasil mengungkap fakta bahwa konflik yang terjadi dalam muktamar Jombang tidak muncul serta-merta, melainkan akumulasi dari berbagai relasi *antagonistik* di seputar pengelolaan organisasi kaum *nahdliyyin*. Tentu saja, determinan utamanya tak lepas dari proses rivalitas politik antar elit NU dalam rangkai menguasai dan mempengaruhi kebijakan organisasi NU untuk kepentingan masing-masing. Dalam konteks itulah, analisis menggunakan teori konflik dan elit digunakan sebagai pisau analisis sehingga menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam suksesi kepemimpinan dalam muktamar Jombang.

Intervensi partai politik. Tudingan adanya intervensi politik dari partai politik terhadap Muktamar NU di Jombang yang dihembuskan oleh pihak penantang *incumben* yakni, Kelompok Kiai Hasyim-Gus Solah terbukti benar. Hal ini diperkuat oleh banyak kesaksian para muktamirin di arena Muktamar. Menurut pandangan Martin van Bruinessen yang juga hadir di muktamar menyakini peran Partai Politik dalam suksesi kepemimpinan di Muktamar NU ke 33 merupakan hal yang sulit untuk dibantah. Para Elit Partai Politik yang sangat berkepentingan untuk tetap dapat

memegang hegemoni dalam organisasi NU. Walaupun hal tersebut ditepis oleh para elit Parpol, baik di pusat maupun daerah namun mereka secara nyata terlibat dalam suksesi kepemimpinan di arena muktamar.

UCAPAN TERIMAKASIH (Optional)

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing Budhi Gunawan dan Firman Manan di Universitas Padjadjaran dan JUPIIS untuk jurnal sehingga bisa terbit untuk jurnal ini, sekian terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. (2004). *Avonturisme "NU, Menjejak Akar Konflik- Kepentingan Politik Kaum Nahdhiyyin"*. Bandung: Humaniora.
- BangsaOnline.com, Minggu, 29 Oktober 2017 22:00 WIB.
- Bartens, K. & Nugroho. (1985). *Realita Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Barton, G. & Greg, F. (1997). *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LkiS.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Cakrawangsa, C.R. (2012). *Dinamika Politik Suksesi NU: Studi terhadap Pergulatan Kepentingan Politik pada Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama Tahun 2010 di Makasar*, Tesis Fisip-UI.
- Cosbin, S.A.J. (1990). *Basics of Qualitative and Quantitative Research: Grounded Theory Procedures and Technique*, Sage: Newbury Park.
- Cresswell, J.W. (2013). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Duverger, M. (2002). *Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Faslah, R. (2005). *Nahdlatul Ulama dan Pemilihan Umum Presiden 2004, Studi Konflik Politik Kiai NU dalam Pencalonan KH. Hasyim Muzadi sebagai Calon Wakil Presiden pada Pemilu Presiden 2004*, Depok: Tesis Fisip-UI.
- Ida, L. (1995). *Dinamika Internal Nahdlatul Ulama (NU) setelah kembali ke Khittah 1926*, Depok: tesis Fisip-UI.

- Iqbal, M. (2001). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kholik, A. (2004). *Dinamika Hubungan Muhammadiyah dengan NU Pasca Orde Baru (1998-2003)*. Tesis. Pascasarjana Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU. (2015). "Hasil-hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama," Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015
- Liputan6.com, minggu 29 oktober 2017 19:05 WIB.
- Mandan, A.M. (2008). *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid, Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS).
- Moleong, L.J. (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, M.Z. (2006). *Tantangan NU Pasca-Muktamar, Opini di Media Indonesia tanggal 6 Agustus 2015*.
- Muhlisin, I.A. (2007). *Dialektika Demokrasi NU: Mengurai Konflik pada Muktamar NU ke-31 di Solo*.
- Nasution, S. (2003), *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Parma, S.P. (2001). *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rauf, M. (2001). *Konsesus dan Konflik Politik*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.
- Subianto, W. (1999) dari CNN Indonesia mewawancarai KH Ahmad Hasyim Muzadi yang dimuat dalam Hasyim Soal Muktamar: Ulama Turun Harga Jika Dipilih Politisi, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com>.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana.
- Taufik, M. (1999). "Benarkah PKB mengintervensi Muktamar NU di Jombang?", diakses dari <http://www.merdeka.com>
- Tempo.com, Minggu, 29 Oktober 2017 22:01 WIB.
- Wahid, M. dkk. (1999). *Dinamika NU, Perjalanan Sosial dari Muktamar Cipasung (1994) ke Muktamar Kediri (1999)*, Jakarta: Kompas dan Lakpesdam NU.
- Wasono, H.T. (1999). *Penyusup Parpol, Gus Solah: Ini Muktamar NU atau PKB?*, diunduh dari situs <http://m.tempo.co>
- Widjaja, A. (1999). *Budaya Politik dan Pembangunan Politik*, Jakarta: LP3ES
- Zaini, A. (2004). "NU dan Politik (Studi Tentang Konflik Politik di Internal NU, 1952-2003)". Tesis. Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pascasarjana Universitas Indonesia.